DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bunga, D. (2019b). Kebijakan formulasi judi online dalam hukum Indonesia. *Vyavahara Duta*, *14*(1), 21–34.

Cook, K. S. (1977). Exchange and power in networks of interorganizational relations. *The Sociological Quarterly*, *18*(1), 62–82.

Dunn, W. N. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kadir, A. (2020). Fenomena Kebijakan Publik dalam perspektif administrasi publik di Indonesia. *CV. Dharma Persada*.

Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus Agustino, L. (2016). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Bandung: Alfabeta.

Lester, J. P., & Stewart, J. (2000). Public Policy: An Evolutionary Approach Wadsworth. *Stamford. USA*.

Miles, B., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (K. Perry & K. Koscielak, Eds.; 3rd ed.). SAGE Publications,Inc.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif/Lexy J. Moleong*.

Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta.

Rhodes, R. A.W. 2015. *Analisis Jaringan Kebijakan dalam Michael Moran, et al, Handbook Kebijakan Publik* (Edisi Terjemahan). Nusa Media : Bandung.

Sugiyono, S. (2019). Metode penelitian kualitatif. bandung: Alfabeta. Google Scholar Alfabeta.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Cv Alfabeta.

Jurnal/skripsi

Alkarni, A. S., & Taun, T. (2023). Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online (Studi Kasus Judi Slot). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(4), 55–59.

Bunga, D. (2019). Kebijakan formulasi judi online dalam hukum Indonesia. *Vyavahara Duta*, *14*(1), 21–34.

Cook, K. S. (1977). Exchange and power in networks of interorganizational relations. *The Sociological Quarterly*, *18*(1), 62–82.

Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, *6*(1), 83–88.

Hidayat, A. R., & Susanti, G. (2015). 98766-ID-model-jaringan-kebijakan-publik-perumusa. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, *1*, 209–218.

Kadir, A. (2020). Fenomena Kebijakan Publik dalam perspektif administrasi publik di Indonesia. *CV. Dharma Persada*.

Karli, K., Harvelian, A., Safitri, A. M., Wahyudi, A., & Pranacitra, R. (2023). *Penyuluhan Pengabdian Hukum dalam Mengatasi Dampak Negatif Judi Online terhadap Kesejahteraan Buruh*.

Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media

Lester, J. P., & Stewart, J. (2000). Public Policy: An Evolutionary Approach Wadsworth. *Stamford. USA*.

Nafila, H. (2022). Kajian Komparasi atas Tindakan Endorse (Promosi) Judi Online dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Bandung Conference Series: Law Studies*, *2*(1), 183–188.

Nisa Amalina Adlina. (2025). *Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia*. Journal of Contemporary Law Studies.

Rila Kusumaningsih & Suhardi. (2023). *Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat*. Jurnal Pengabdian Masyarakat.

Permana, H. C., & Saefudin, Y. (2023). Peranan Kepolisian Polres Purbalingga Dalam Penanggulangan Judi Online Pragmatic Play/Slot Di Wilayah Purbalingga. *Amerta Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *3*(2), 19–28.

Rinaldi, R. (2024). Pengawasan dan Penindakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelanggar Qanun Hukum Jinayah di Alue Naga. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Rizkita, A. F. (2023). Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, *1*(5), 25–33.

Sry Arlina, E. (2020). Penataan Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Budaya Pampang Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Publik*, *8*(3), 9414–9427.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Cv Alfabeta.

Susanti, G. (2012). Jaringan Pelayanan Publik yang Demokratis: Studi Kasus Sistem Koordinasi Dalam Penentuan Strategi Pelayanan Pendidikan Berbasis Jaringan di Kota Makassar. *Disertasi). Program Pascasarjana Unhas*.

Undang-Undang

UU Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Maisir)

Peraturan terkait Pemerintah Daerah / Qanun Aceh

Pergub Nomor 47 tahun 2008 tentang tufoksi Satpol PP dan (WH)